

PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN STARTUP DENGAN HAK *MULTIPLE VOTING SHARES* TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM BIASA DARI PRESPEKTIF HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA

Oleh: Muhammad Raihan¹ dan Veri Antoni²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pemegang saham perusahaan *startup* dengan hak *multiple voting shares* guna melindungi pemegang saham biasa dari perspektif hukum perseroan di Indonesia. Selain itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui *best practice* terhadap penerapan *multiple voting shares* bagi perusahaan *startup* di Indonesia untuk dapat memaksimalkan efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang saham biasa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan wawancara. Penelitian dilakukan melalui studi pustakan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan *multiple voting shares* dan pertanggungjawaban bagi pemegang sahamnya sehingga ditemukan bentuk-bentuk konsep dan mekanisme untuk memberikan perlindungan bagi pemegang saham biasa. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pemegang saham *multiple voting shares* dengan hasil sebagai berikut: Pertama, pengaturan *multiple voting shares* di Indonesia telah mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penggunaan *multiple voting share* bagi perusahaan *startup* di Indonesia dalam peraturan OJK namun belum terdapat perlindungan yang maksimal bagi pemegang saham biasa terhadap pengendalian perseroan akibat kepemilikan dengan jenis *multiple voting shares*. Kedua, sebagai upaya dalam melindungi pemegang saham biasa dari kekuasaan pemegang saham *multiple voting shares* diperlukan perubahan pengaturan OJK mengenai *multiple voting shares* secara lebih jelas, tegas, *ridig*, serta mengatur beberapa hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yakni pemaksimalan perlindungan bagi pemegang saham biasa.

Kata kunci: *Multiple Voting Shares*, Pertanggungjawaban Pemegang Saham
Multiple Voting Shares, Perlindungan Pemegang Saham Biasa

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

***THE ACCOUNTABILITY OF SHAREHOLDERS IN STARTUP
COMPANIES WITH MULTIPLE VOTING SHARES REGARDING THE
PROTECTION OF ORDINARY SHAREHOLDERS FROM THE
PERSPECTIVE OF CORPORATE LAW IN Indonesia***

by: Muhammad Raihan³ and Veri Antoni⁴

ABSTARCT

The purpose of this legal writing is to understand and analyze the accountability of shareholders in startup companies with multiple voting shares to protect ordinary shareholders from a legal perspective under Indonesian company law. Furthermore, this legal research aims to determine best practices for implementing multiple voting shares for startup companies in Indonesia to maximize the effectiveness of legal protection for ordinary shareholders.

The research methodology used in this study is normative juridical research supported by interviews. The research is conducted through literature studies and is based on the prevailing laws and regulations in Indonesia. This study is conducted by examining the rules regarding multiple voting shares and the accountability of their shareholders, thereby identifying conceptual forms and mechanisms to provide protection for ordinary shareholders. Data analysis is conducted using a qualitative descriptive method, resulting in conclusions that can address the main issues raised in this research.

This research discusses the accountability of multiple voting share shareholders with the following results: First, the regulation of multiple voting shares in Indonesia specifically addresses the mechanism of using multiple voting shares for startup companies in Indonesia in the OJK (Financial Services Authority) regulations. However, there is still no maximum protection for ordinary shareholders against control by shareholders with multiple voting shares. Second, in order to protect ordinary shareholders from the power of multiple voting share shareholders, it is necessary to make clearer, more explicit, rigid regulations regarding multiple voting shares in the OJK regulations and address certain aspects that are not covered in Law Number 40 of 2007, which is the maximization of protection for ordinary shareholders.

Keywords: Multiple Voting Shares, Accountability of Multiple Voting Shareholders, Protection of Ordinary Shareholders.

³ Student of the Departement of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

⁴ Lecturer of the Departement of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.